



Sambut Baik tapi Masih Tunggu Regulasi

Kelurahan Sudah Kelola Anggaran Ratusan Juta

JOGJA - Dalam Temu Karya Nasional di Bali 19 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan pada 2019 nanti setiap kelurahan akan mendapat dana kelurahan. Layaknya dana desa. Tapi masih ditunggu petunjuk teknis (Juknis).

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Jogja Zenni Lingga mengaku menjadi salah satu peserta Temu Nasional di Bali tersebut, saat Jokowi menyatakan akan

memberikan dana kelurahan. "Saat itu memang ada statement Presiden akan ada dana kelurahan seperti dana desa, sementara informasinya baru itu," kata Zenni kemarin (23/10).

Zenni belum bisa berkomentar banyak karena belum ada juknis maupun undangan dari Kementerian terkait tentang dana kelurahan tersebut. Tapi secara prinsip, jelas dia, Pemkot Jogja dan jajarannya siap jika dana tersebut dicairkan. "Tentu sebelumnya ada pembekalan dulu," ujarnya.

Kelurahan sendiri, tambah Zenni, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, meru-

pakan perangkat dari kelurahan. Perangkat maupun anggaran yang dikelola kelurahan melekat pada organisasi perangkat daerah (OPD) kecamatan.

Saat ini, lanjut dia, tiap kelurahan sudah mengelola anggaran pemberdayaan masyarakat, yang jumlahnya beragam tiap kelurahan. Tapi rerata berkisar Rp 350 juta tiap kelurahan, diluar belanja pegawai. Selain itu, lanjut dia, warga di wilayah kelurahan juga mendapat dana hibah, mulai hibah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebesar Rp 80 - 120 juta. Ada juga hibah RW Rp 10 juta per tahun dan hibah administrasi RW

Rp 1,5 juta per tahun dan RT Rp 1,2 juta per tahun. "Kalau ditotal dana yang dialokasikan Pemkot sudah lebih dari ketentuan dalam UU Otda, yang mensyaratkan minimal lima persen dari APBD setelah dikurangi DAK," terangnya.

Terpisah Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menyambut baik adanya dana kelurahan. Menurut dia persoalan di kota tidak kalah rumit dengan persoalan yang ada di desa. Dengan adanya dana kelurahan bisa menyelesaikan persoalan yang mendasar bagi setiap kelurahan serta mempercepat proses pembangunan yang ada

di kelurahan. "Biasanya Kota menjadi limpahan dari persoalan yang ada di desa," jelas HP.

Selama ini, Heroe menambahkan, dana yang didapatkan Kelurahan berasal dari APBD Kota Jogja saja. Hingga saat ini, dana Rp 3 triliun yang akan dialokasikan untuk dana Kelurahan masih belum jelas ketentuannya seperti apa. "Kami masih belum tahu, apakah nanti dibagi sama rata atau sesuai dengan jumlah penduduk," kata mantan wartawan itu.

Sedang Lurah Warungboto Umbulharjo Akhmad Zainuri mengaku, dana Kelurahan yang akan digelontorkan

oleh Pemerintah Pusat masih belum memiliki kepastian. Sementara menunggu regulasi yang pasti, Kelurahan Warungboto masih belum memiliki persiapan untuk mengalokasikan dana Kelurahan tersebut.

Serupa dengan Lurah Klitren Gondokusuman Anggit Safrudin yang juga belum tahu menahu akan petunjuk pelaksanaan dana Kelurahan. Anggit masih belum tahu nantinya dana akan diberikan kepada otonomi desa atau akan dikelola penuh.

"Ini hanya tinggal menunggu petunjuk teknisnya saja dari pemerintah," kata Anggit. (cr7/pra/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005